

MEMBANGUN HORTIKULTURA BERDASARKAN ENAM PILAR PENGEMBANGAN



**DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
DEPARTEMEN PERTANIAN
MARET, 2008**

MEMBANGUN HORTIKULTURA BERDASARKAN ENAM PILAR PENGEMBANGAN

I. PENDAHULUAN

Komoditas hortikultura merupakan komoditas potensial yang mempunyai nilai ekonomi dan permintaan pasar yang tinggi. Luas wilayah Indonesia dengan keragaman agroklimatnya memungkinkan pengembangan berbagai jenis tanaman baik tanaman hortikultura tropis maupun hortikultura subtropis, yang mencakup 323 jenis komoditas, yang terdiri dari 60 jenis komoditas buah-buahan, 80 jenis komoditas sayuran, 66 jenis komoditas biofarmaka dan 117 jenis komoditas tanaman hias. Dengan demikian tidaklah mengherankan apabila kontribusi subsektor hortikultura pada Produk Domestik Bruto (berdasarkan harga berlaku) pada tahun 2005 mencapai Rp. 61.792,44 Trilyun dan pada tahun 2006 menjadi Rp. 68.640,39 Trilyun. Tahun 2007 (prognosa) menjadi 74.768 Trilyun dan pada tahun 2008 direncanakan menjadi 78.292 Trilyun. Hal ini menunjukkan peran penting subsektor hortikultura dalam mendukung perekonomian nasional, khususnya dalam upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Keragaman jenis komoditas hortikultura yang begitu besar dan nilai ekonomis yang tinggi, menimbulkan kesulitan tersendiri dalam memilah prioritas komoditas yang akan dikembangkan, karena hal tersebut sangat terkait dengan kekuatan pasar serta prioritas kebijakan di Pusat dan Daerah. Namun demikian, Pemerintah telah menetapkan 10 (sepuluh) prioritas komoditas prioritas hortikultura nasional, yaitu mangga, manggis, pisang, durian, jeruk, bawang merah, cabe merah, kentang, rimpang, dan anggrek. Masing-masing daerah juga telah menetapkan komoditas unggulan daerah sesuai potensi dan kekhasan di wilayahnya, seperti salak, duku, markisa, nangka, nenas, melon, paprika,

kubis, tomat, tanaman hias non anggrek dan lain-lain. Keterbatasan pendanaan Pemerintah dalam mengembangkan hortikultura, baik di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten menuntut perlunya keterpaduan dan fokus pengembangan serta sinergi dari berbagai program dan pendanaan yang ada baik di Pusat dan di Daerah serta keterlibatan dan peran swasta/pengusaha, sehingga dapat dicapai hasil yang sebaik-baiknya. Swasta diharapkan dapat berperan jauh lebih besar mengingat nilai ekonomi komoditas hortikultura yang tinggi, sehingga Pemerintah dalam hal ini lebih banyak bertindak sebagai fasilitator, regulator dan motivator yang bersifat mendukung dan memberikan berbagai akses dan kemudahan bagi swasta dalam memacu pengembangan hortikultura.

Walaupun produk hortikultura umumnya mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, namun produk hortikultura mempunyai karakteristik yang mudah rusak (*perishable*) sehingga hal tersebut sangat berdampak terhadap harga dan pendapatan petani. Artinya dalam pengembangan hortikultura perlu mempertimbangkan banyak faktor, seperti permintaan (kebutuhan) pasar, jalur distribusi, rantai pasar, mutu produk dan faktor-faktor lainnya yang terkait mulai dari produk tersebut dihasilkan sampai ke tangan konsumen.

Di sisi lain tuntutan masyarakat terhadap produk hortikultura bermutu semakin tinggi. Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di dalam negeri, yang dicirikan dengan berkembangnya pasar-pasar swalayan/hypermart di kota-kota besar memberikan peluang dan tantangan tersendiri karena pasar-pasar tersebut melayani pangsa pasar masyarakat menengah-atas, yang menuntut kualitas produk pada tingkat tertentu yang lebih baik. Perkembangan pasar-pasar swalayan yang pesat tersebut perlu disikapi pula dengan penyediaan produk hortikultura yang bermutu.

Di tingkat perdagangan internasional dimana hambatan *tariff* telah dihilangkan/dikurangi melalui kesepakatan WTO, lalulintas produk komoditas pertanian suatu negara dapat masuk ke berbagai negara di dunia sejauh memenuhi ketentuan persyaratan teknis di negara tujuan. Transaksi perdagangan komoditas hortikultura dunia yang tinggi merupakan peluang yang sampai saat ini masih belum dimanfaatkan oleh pebisnis hortikultura nasional. Kendala mutu terutama dalam menghasilkan produk bermutu yang memenuhi standar sertifikasi mutu nasional/regional/internasional dan ketersediaan data yang terkait dengan persyaratan SPS dan persyaratan karantina lainnya merupakan hambatan utama dalam meraih pangsa pasar hortikultura global. Demikian pula sistem rantai pasokan komoditas yang belum tertata dengan baik telah melemahkan daya saing produk hortikultura Indonesia di pasar dalam negeri dan juga di pasar internasional, termasuk di antaranya kelembagaan usaha di tingkat petani yang belum solid, kemitraan yang belum transparan dan rantai pasokan yang panjang dan tidak efisien. Pada tahun 2006, nilai ekspor hortikultura Indonesia sebesar 518.463 ton dengan nilai sebesar US\$ 291.937.451. Ekspor buah-buahan menyumbang sekitar 50%, dengan nilai total sebesar US\$144.492.469, sayuran US\$16.217.171, tanaman hias US\$16.331.671 dan tanaman biofarmaka US\$ 4.896.140.

Pengembangan hortikultura dalam perspektif paradigma baru tidak hanya terfokus pada upaya peningkatan produksi komoditas saja tetapi terkait juga dengan isu-isu strategis dalam pembangunan yang lebih luas lagi. Pengembangan hortikultura merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya: 1) pelestarian lingkungan, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan, 2) menarik investasi skala menengah kecil dengan luasan usaha 1 – 5 Ha dan investasi Rp 1 – 25 milyar di pedesaan, 3) pengendalian inflasi stabilisasi harga komoditas strategis (cabe merah dan bawang), 4) pelestarian dan pengembangan identitas nasional (anggrek, jamu, dll), 5)

peningkatan ketahanan pangan melalui penyediaan karbohidrat alternatif, dan 6) menunjang pengembangan sektor pariwisata.

Berbagai kendala dan permasalahan yang terkait dalam upaya meningkatkan produksi, mutu dan daya saing produk hortikultura tersebut perlu disikapi dengan pendekatan pengembangan hortikultura secara terpadu dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang dikenal dengan 6 (enam) pilar pengembangan hortikultura, yang merupakan fokus kegiatan prioritas dalam mengembangkan hortikultura yang dilaksanakan secara simultan dan terintegrasi antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten dalam memfasilitasi dan mempermudah akses swasta/pengusaha dalam mengembangkan hortikultura. Ke 6 (enam) pilar kegiatan pengembangan hortikultura tersebut adalah:

1. Pengembangan Kawasan Agribisnis Hortikultura,
2. Penataan Manajemen Rantai Pasokan (*supply chain management*),
3. Penerapan Budidaya Pertanian yang Baik (*Good Agricultural Practices/GAP*) dan *Standard Operating Procedure* (SOP),
4. Fasilitasi Terpadu Investasi Hortikultura,
5. Pengembangan Kelembagaan Usaha,
6. Peningkatan Konsumsi dan akselerasi ekspor.

Ke semua program tersebut di atas menjadi satu kesatuan yang saling terkait dan tergantung sehingga tidak dapat di pisah – pisahkan.

Kawasan agribisnis hortikultura diharapkan sebagai lokus sasaran wilayah pengembangan hortikultura. Melalui pendekatan kawasan, karakteristik hortikultura yang spesifik dengan keragaman komoditas yang ada serta dengan nilai ekonomi yang tinggi dan waktu panen yang berbeda, secara utuh dalam suatu wilayah akan saling melengkapi dan merupakan potensi ekonomi

yang dapat dijadikan sandaran dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Untuk meningkatkan daya saing produk kawasan tersebut, maka dalam kawasan tersebut perlu didukung oleh berbagai upaya, antara lain melalui penerapan GAP/SOP, pengembangan kelembagaan usaha, penataan rantai pasokan komoditas dan menarik para pemilik modal (swasta) agar mau menanamkan modalnya untuk berusaha di bidang hortikultura.

II. PENDEKATAN ENAM PILAR PENGEMBANGAN HORTIKULTURA

Rincian dari masing-masing ke enam pilar pengembangan hortikultura diuraikan secara ringkas sebagai berikut :

1. Pengembangan Kawasan Hortikultura.

Kawasan Agribisnis Hortikultura merupakan suatu wilayah dengan kesamaan ekosistem dan disatukan oleh fasilitas infrastruktur ekonomi yang sama sehingga membentuk kawasan yang berisi berbagai kegiatan usaha berbasis hortikultura mulai dari penyediaan sarana produksi, budidaya, penanganan dan pengolahan pasca panen, dan pemasaran serta berbagai kegiatan pendukungnya

Tujuan pengembangan kawasan hortikultura adalah (1) Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil pertanian, (2) Mengembangkan keanekaragaman usaha pertanian yang menjamin kelestarian fungsi dan manfaat lahan, (3) Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan, meningkatkan kesempatan berusaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat dan Negara, (4) Meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat petani, dan (5) Meningkatkan ikatan komunitas masyarakat disekitar

kawasan yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian dan keamanannya.

Manfaat dari pengembangan kawasan hortikultura diantaranya; (1) Pengembangan kawasan hortikultura memungkinkan penanganan berbagai komoditas hortikultura secara terpadu sesuai dengan kesamaan karakteristiknya, (2) Membuka kesempatan semua komoditas hortikultura yang penting disuatu kawasan ditangani secara proposional serta tidak mendorong daerah menangani komoditas prioritas nasional yang tidak sesuai untuk daerahnya, (3) Pengembangan kawasan hortikultura dapat menjadi wadah dan wahana bagi pelaksana desentralisasi pembangunan secara nyata dengan pembagian dan keterkaitan fungsi antar tingkatan pemerintah secara lebih proposional. Ekstrenalitas pengembangan kawasan yang bersifat lintas wilayah administratif menuntut pembagian kewenangan dan keterkaitan fungsi yang kuat dan harmonis antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten, (4) Critical mass penggalangan sumberdaya akan lebih tercipta sehingga sinergi dari berbagai sumberdaya tersebut akan terjadi, dan (5) Akan terjadi kejelasan karakter dan pengukuran kinerja untuk jenis kegiatan pengembangan dan perbaikan kawasan, sehingga akan tercipta insentif bagi para pelaksana di kabupaten untuk kedua jenis kegiatan tersebut dibandingkan dengan kecenderungan selama ini yang lebih mementingkan kegiatan pengembangan daripada pemantapan (perbaikan), serta (6) Akan terjadi kegiatan ekonomi di kawasan dan sekitarnya yang mempercepat pertumbuhan pendapatan, penyerapan tenaga kerja dan tumbuhnya sektor – sektor usaha terkait (*Backward and forward linkages*).

Didalam pengembangan kawasan, baik yang lama maupun yang baru beberapa hal yang perlu dilakukan adalah sbb: 1) susun profil dan peta kawasan sebagai acuan perencanaan kedepan, 2) identifikasi status rantai pasokan

(*existing supply chain*) sebagai acuan untuk strukturisasi rantai pasokan yang lebih efisien, 3) merencanakan pengembangan kawasan, 4) sosialisasikan rancangan pengembangan kawasan dan 5) galang dukungan sektor terkait dan para pelaku bisnis dan masyarakat hortikultura dalam pengembangan kawasan.

2. Penerapan *Supply Chain Management* (SCM)

Pembangunan agribisnis hortikultura perlu dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dengan memperhatikan keseluruhan aspek dan segmen agribisnis dari hulu sampai ke hilir dan perangkat penunjangnya menuju keseimbangan antara usaha peningkatan produksi, perbaikan distribusi dan peningkatan konsumsi, yang menguntungkan semua pihak. Untuk memetakan kondisi dan permasalahan yang ada, membuat analisis kebutuhan perbaikan, menetapkan target-target perbaikan dan menyusun rencana aksinya perlu digunakan pendekatan *Supply Chain Management* (SCM) atau Pengelolaan Rantai Pasokan.

Pada intinya SCM adalah suatu jejaring organisasi yang saling tergantung dan bekerjasama secara menguntungkan melalui pengembangan sistem manajemen untuk perbaikan sistem penyaluran produk, informasi, pelayanan dan dana dari pemasok ke pengguna akhir (konsumen). Konsep SCM dilakukan agar peningkatan daya saing itu tidak semata dilakukan melalui perbaikan produktivitas dan kualitas produk, tetapi juga melalui pengemasan, pemberian merk, efisiensi, transportasi, informasi, penguatan kelembagaan dan penciptaan inovasi secara kontinyu dan sistematis.

SCM merupakan siklus lengkap produksi, mulai dari kegiatan pengelolaan di setiap mata rantai aktifitas produksi sampai siap untuk digunakan oleh pemakai/user. Pendekatan SCM didasarkan pada; (a) Proses budidaya untuk menghasilkan produk (hortikultura), (b) Mentransformasikan

bahan mentah (penanganan panen dan pasca panen), dan (c) Pengiriman produk ke konsumen melalui sistem distribusi.

Dengan demikian dalam penerapan SCM tidak hanya menuntut GAP, tetapi juga mencakup GHP (*Good Handling Practices*), GMP (*Good Manufacturing Practices*) dan GTP (*Good Trading Practices*).

Untuk menjamin keberhasilan penerapan *Supply Chain Management* (SCM) atau Manajemen Pengelolaan Rantai Pasokan perlu memahami faktor-faktor pendukung keberhasilan antara lain : kebijakan, sumber daya manusia, prasarana, sarana, teknologi, kelembagaan, modal/ pembiayaan, sistem informasi, sosial budaya dan lingkungan lain. Proses aktifitas dalam penerapan SCM memiliki 5 aliran utama yang harus dikelola dengan baik aliran produk, aliran informasi, aliran dana, aliran pelayanan dan aliran kegiatan.

Didalam strukturisasi rantai pasokan beberapa hal yang perlu dilakukan adalah sbb: 1) identifikasi status rantai pasokan, 2) susun rencana strukturisasi rantai pasokan sbg tindak lanjut butir (1) tersebut, 3) kembangkan sistem informasi yang menghubungkan konsumen-pedagang-petani vice versa, 4) sosialisasikan dan terapkan GAP, GHP, GMP dan GTP, 5) galang dukungan sektor terkait, pelaku bisnis dan masyarakat hortikultura dalam merestrukturisasikan rantai pasokan.

3. Penerapan GAP/SOP

Penerapan GAP melalui SOP yang spesifik lokasi, spesifik komoditas dan spesifik sasaran pasarnya, dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk yang dihasilkan petani agar memenuhi persyaratan konsumen dan memiliki daya saing tinggi dibandingkan dengan produk padanannya dari luar negeri.

Penerapan GAP di Indonesia didukung dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Pertanian No. 61/Permentan/OT.160/ 11/2006, tanggal 28 November 2006 untuk komoditi buah, sedangkan untuk komoditas sayuran masih dalam proses penerbitan menjadi Permentan. Dengan demikian penerapan GAP oleh pelaku usaha mendapat dukungan legal dari pemerintah pusat maupun daerah.

Tujuan dari penerapan GAP/POS diantaranya; (1) Meningkatkan produksi dan produktivitas, (2) Meningkatkan mutu hasil buah-buahan termasuk keamanan konsumsi, (3) Meningkatkan efisiensi produksi dan daya saing, (4) Memperbaiki efisiensi penggunaan sumberdaya alam, (5) Mempertahankan kesuburan lahan, kelestarian lingkungan dan sistem produksi yang berkelanjutan, (6) Mendorong petani dan kelompok tani untuk memiliki sikap mental yang bertanggung jawab terhadap kesehatan dan keamanan diri dan lingkungan, (7) Meningkatkan peluang penerimaan oleh pasar internasional, dan (8) Memberi jaminan keamanan terhadap konsumen. Sedangkan sasaran yang akan dicapai adalah terwujudnya keamanan pangan, jaminan mutu, usaha agribisnis hortikultura berkelanjutan dan peningkatan daya saing.

Untuk mempercepat penerapan GAP/SOP dilakukan hal-hal sebagai berikut : (1) Mendorong terwujudnya SCM komoditas hortikultura, (2) Merubah paradigma dari pola produksi menjadi *market driven*, (3) Mendorong peran *supermarket*, *retailer*, *supplier*, dan eksportir untuk mempersyaratkan mutu dan jaminan keamanan pangan pada produk, (4) Penyediaan tenaga pendamping penerapan GAP, (5) Melakukan sinkronisasi dengan program instansi terkait lainnya, (6) Perumusan program bersama instansi terkait lainnya dan melakukan promosi, (7) Target kuantitatif pencapaian kebun GAP tercantum dalam Renstra Departemen Pertanian, (8) Mendorong registrasi kebun oleh Dinas

Pertanian Propinsi dan sertifikasi produk oleh OKKPP (otoritas kompeten keamanan pangan pusat) dan OKKPD (otoritas kompeten keamanan pangan daerah) serta lembaga sertifikasi produk lainnya dan (9) Mendorong sosialisasi penerapan dan sertifikasi GAP melalui jalur pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, pelayanan dan pengaturan, diseminasi teknologi.

Fokus penerapan GAP diprioritaskan untuk produk-produk tujuan ekspor dan pasar modern serta bahan baku industri pengolahan.

4. Fasilitasi Terpadu Investasi Hortikultura (FATIH)

Peningkatan daya saing memerlukan inovasi masyarakat dan pemerintah baik untuk memperbaiki kinerja system segmen rantai pasokan yang sudah ada maupun membangun rantai pasokan yang baru. Investasi tersebut memerlukan fasilitasi berbagai pihak sesuai dengan fungsi, kompetensi dan kewenangan yang berbeda. Berbagai instansi dan institusi penyedia layanan investasi tersebut perlu dikoordinasikan agar fungsi pelayanan dalam berbagai aspek faktor penentu keberhasilan investasi (kebijakan, prasarana, sarana, modal dan teknologi, kelembagaan, SDM, sistem informasi dan lain-lain) berjalan secara sinergis. Oleh karena itu dibangun suatu jejaring kerja untuk mewadahi fasilitasi secara terpadu untuk mendorong dan merealisasikan investasi hortikultura.

Pengembangan agribisnis hortikultura tidak dapat dilakukan sepenuhnya oleh Departemen Pertanian dan Dinas Pertanian baik di tingkat propinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. Pengembangan agribisnis hortikultura sangat tergantung seberapa jauh kelembagaan pemerintah di luar sektor pertanian memberikan perhatian. Oleh karena itu sangat diperlukan upaya menggalang dukungan dan investasi dari berbagai pihak, baik pemerintah (pusat dan daerah), pihak swasta (pelaku usaha), petani maupun masyarakat, bahkan

bantuan dari pihak asing sekalipun. Terobosan pemikiran telah dirancang untuk menggerakkan berbagai pihak untuk meningkatkan investasi atau memberikan kemudahan dalam berinvestasi di bidang agribisnis hortikultura melalui penerapan konsep Fasilitas Terpadu Investasi Hortikultura.

Fasilitas Terpadu Investasi Hortikultura merupakan upaya yang digunakan untuk menciptakan iklim usaha di bidang hortikultura yang kondusif sekaligus dapat meningkatkan daya saing produk. Selain mengintegrasikan pelayanan dan program dari seluruh kelembagaan yang berperan dalam pengembangan usaha, FATIH juga digunakan untuk membenahi dan meningkatkan efisiensi dari pengelolaan rantai pasokan (SCM) komoditas hortikultura.

Fasilitas Terpadu Investasi Hortikultura akan dilaksanakan secara bertahap dalam perspektif waktu yang bersifat tahunan (multi years). Melalui Fasilitas Terpadu Investasi Hortikultura seluruh kelembagaan pemerintah yang terkait di dorong untuk dapat memfokuskan prioritas pengembangan wilayah dan berhubungan secara terbuka serta sinergis. Komitmen yang tumbuh baik antara kelembagaan pemerintah tersebut maupun antara pemerintah dengan investor dan pelaku usaha pada sistem pendukung akan terus di pupuk.

Dengan Fasilitas Terpadu Investasi Hortikultura para investor diharapkan dapat lebih tertarik dan percaya diri untuk menanamkan investasinya mengingat pemerintah menyiapkan kondisi yang lebih kondusif melalui upaya: 1) pengembangan iklim usaha yang lebih kondusif dengan memperjelas program pengembangan di masing-masing sentra, dan memperjelas komitmen pemerintah pusat, propinsi, kabupaten/kota dan komitmen para pelaku agribisnis yang terkait, dan 2) pembenahan pelayanan jasa publik sehingga dapat mengurangi hambatan usaha baik berupa peninjauan regulasi,

pengurangan pungutan baik resmi maupun tidak resmi dalam proses perizinan dan percepatan proses perizinan, serta 3) peningkatan daya saing komoditi hortikultura dengan membenahan *supply chain management* (SCM) setiap komoditas hortikultura terutama yang berorientasi ekspor dan komoditas yang berfungsi sebagai substitusi impor.

Didalam pelaksanaan FATIH beberapa hal yang perlu dilakukan adalah sbb: 1) penyusunan profil kawasan hortikultura yang akan dibanahi, 2) penyusunan rancang bangun pengembangan kawasan tersebut, 3) tetapkan peran (*expected role*) dari kelembagaan pemerintah terkait, pelaku bisnis dan masyarakat hortikultura, 4) laksanakan konvensi seluruh pemangku kepentingan yang membahas dan menyepakati rancang bangun pengembangan kawasan tersebut serta menyetujui pelaksanaan *expected role* dari masing-masing pemangku kepentingan, 5) Fasilitasi dengan baik terhadap faktor-faktor penting agar investor tertarik berinvestasi antara lain infrastruktur, permodalan, sarana produksi, teknologi, informasi, komunikasi, energi (listrik, dll), perizinan, dan kemudahan-kemudahan lainnya, 6) monitor dan diskusikan pelaksanaan konvensi secara berkelanjutan.

5. Pengembangan Kelembagaan Usaha

Kelembagaan usaha sangat penting untuk meningkatkan daya saing rantai pasokan. Untuk itu perlu dibangun kelembagaan yang mampu memperkuat kohesi horizontal dari pelaku-pelaku usaha dari suatu segmen rantai pasokan dan integrasi vertikal dari pelaku usaha dari segmen yang berbeda dalam rantai pasokan. Kohesi horizontal mencakup kerjasama antara kelompok tani/Gapoktan ataupun kerjasama antar pedagang dalam rantai pasokan. Integrasi vertikal merupakan kerjasama antara pelaku usaha dalam segmen yang berbeda, yaitu antara kelompok tani dengan pedagang, termasuk di

dalamnya kerjasama tri- partite antara kelompok tani, pedagang dan asosiasi.

Kondisi usaha hortikultura saat ini dicirikan antara lain oleh lemahnya posisi tawar petani, perdagangan yang tidak transparan yang lebih menguntungkan pedagang dan merugikan petani. Untuk itu dalam membangun hortikultura yang sinergis antara petani dan pelaku usaha diperlukan adanya pemberdayaan kelembagaan usaha baik di tingkat petani dan pedagang yang keduanya mengarah pada posisi kesetaraan, sehingga kedua belah pihak sama-sama merasakan manfaat keuntungan dalam melaksanakan usaha hortikultura. Perlu dibangun hubungan yang harmonis antar kelompok tani dan hubungan yang saling percaya antara kelompok tani dan pedagang, sehingga terjalin kerjasama dagang yang beretika (*Good Trading Practices*), dan pada akhirnya akan memperkuat daya saing rantai pasokan. Peran pemerintah adalah sebagai fasilitator, regulator dan motivator dalam terwujudnya iklim usaha yang kondusif dengan mendorong berkembangnya keharmonisan hubungan kelembagaan usaha tersebut.

Untuk meningkatkan posisi tawar petani dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi usaha diperlukan pembentukan dan pengaktifan kelompok-kelompok tani dan gabungan kelompok tani (*gapoktan*). Keberadaan kelompok tani juga akan memudahkan dalam mensosialisasikan dan menerapkan teknologi, dengan demikian sebagai skala usaha menjadi lebih ekonomis.

Keberadaan kelompok tani /*gapoktan* di suatu kawasan selanjutnya diarahkan untuk menjadi asosiasi petani ataupun asosiasi komoditas. Pembentukan asosiasi ini merupakan wahana yang efektif dalam memperjuangkan aspirasi kebutuhan petani dan dalam menentukan harga dengan para pedagang. Kelembagaan petani yang kuat juga akan menarik

minat investor/pengusaha untuk melaksanakan kemitraan yang pada akhirnya akan memperpendek rantai pasar dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Para pelaku usaha dalam rantai pasokan merupakan para pengusaha dari berbagai tingkatan, baik di tingkat desa, kecamatan sampai tingkat internasional dengan peran dan fungsi dalam rantai pasokan yang berbeda. Pada umumnya para pengusaha tersebut telah mempunyai jaringan hubungan tradisional kemitraan yang kuat. Karena kondisi sistem pemasaran yang tidak tertata dan tidak transparan maka etika dalam berusaha sering lebih banyak menguntungkan pengusaha dan merugikan petani. Oleh karena itu perlu penataan yang menyangkut organisasi dan aturan dagang yang mengarah pada *Good Trading Practices* (GTP). Demikian pula perlu dibentuk organisasi pengusaha baik dalam bentuk asosiasi/forum yang pada dasarnya adalah memfasilitasi terjalinnya jejaring kerja yang efektif dan efisien antar anggotanya dengan petani sebagai produsen serta semua pihak dalam rantai pasar dapat memperoleh keuntungan yang wajar.

Dewasa ini sudah banyak kelembagaan di bidang hortikultura dalam bentuk asosiasi, perhimpunan, masyarakat, forum dan lain-lain, tetapi sebagian besar kurang efektif dan bersifat spesifik komoditas atau wilayah.

Keberadaan Dewan Hortikultura Nasional (DHN) yang telah dideklarasikan pada November 2007 diharapkan dapat mewadahi, merepresentasikan dan mengkomunikasikan berbagai aspirasi dan kepentingan yang berkembang di tingkat produsen (petani/pengusaha), konsumen, pedagang dan industri, pemerintah, perguruan tinggi dan para pemegang kepentingan terkait lainnya. Dengan demikian, peran dan fungsi asosiasi ini antara lain adalah sebagai mitra pemerintah

dalam mendukung dan memperjuangkan berbagai kepentingan dalam memajukan hortikultura nasional.

Di dalam pengembangan kelembagaan beberapa hal yang perlu dilakukan adalah sbb; 1) identifikasi para pelaku kunci agribisnis hortikultura, 2) lakukan dialog dengan para pelaku kunci agribisnis hortikultura tentang format kelembagaan yang diperlukan, 3) dorong para pelaku kunci agribisnis hortikultura untuk membentuk kelembagaan sesuai dengan format yang disepakati, 4) lakukan peningkatan kapasitas para pengurus kelembagaan tersebut untuk menyusun dan mengeksekusi rencana kerja.

6. Peningkatan Konsumsi dan Akselerasi Ekspor

Dalam pengembangan hortikultura, berbagai upaya peningkatan produksi dan mutu hortikultura perlu diikuti oleh upaya peningkatan konsumsi, yang merupakan kesatuan dengan aspek produksi dan distribusi (produksi tidak dapat dinaikkan tanpa diimbangi oleh peningkatan konsumsi).

Konsumsi buah dan sayuran di Indonesia saat ini masih relatif rendah bila dibandingkan dengan rekomendasi FAO dan visi Indonesia Sehat 2010 menurut Departemen Kesehatan sebesar masing-masing 73 kg/kapita/tahun. Pada saat ini konsumsi sayuran per kapita di Indonesia sebesar 35,30 kg/kapita/tahun, sedangkan untuk buah-buahan sebanyak 31,56 kg/kapita/tahun. Peningkatan konsumsi di dalam negeri ditempuh melalui berbagai upaya, antara lain dengan upaya pemasyarakatan peningkatan konsumsi sayuran buah-buahan dalam bentuk promosi, kampanye, gerakan dan sosialisasi dengan bekerjasama dengan instansi terkait, khususnya Departemen Pendidikan Nasional (Sekolah Dasar), Departemen Dalam Negeri (PKK), Dharma wanita, Departemen Kesehatan (Ahli Gizi).

Peluang pasar hortikultura internasional yang terbuka luas sampai saat ini masih belum dimanfaatkan secara baik oleh pelaku hortikultura nasional. Berbagai upaya peningkatan produksi dan mutu yang dilaksanakan seperti penerapan GAP/SOP, penataan rantai pasokan, pengembangan kelembagaan usaha dan peningkatan investasi di bidang hortikultura pada akhirnya diharapkan juga untuk dapat mengisi peluang pasar di tingkat internasional. Untuk peningkatan ekspor hortikultura ditempuh melalui upaya-upaya yang terfokus pada kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas produk sesuai dengan persyaratan importir.
- b. Pemenuhan persyaratan perkarantinaan (*Sanitary and Phytosanitary* = SPS) sesuai dengan ISPM yang ada dan CITES (Kehutanan).
- c. Inisiasi protokol ekspor hortikultura
- d. Penyediaan dan fasilitasi informasi pasar internasional
- e. Penguatan jejaring kerja stakeholders hortikultura (lintas sektor dan para pelaku usaha)
- f. Pengembangan kawasan gerbang ekspor.

III. PENERAPAN ENAM PILAR PENGEMBANGAN HORTIKULTURA

Dalam mengembangkan hortikultura, ke enam pilar pengembangan harus dilihat sebagai suatu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan. Untuk memudahkan mengevaluasi sejauh mana tingkat penerapan 6 pilar pengembangan hortikultura dalam mengembangkan hortikultura di daerah, maka telah disusun tabel check list ke-6 pilar pengembangan tersebut. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut maka secara tidak langsung akan memandu kegiatan-kegiatan apa saja yang diperlukan untuk mengembangkan hortikultura berdasarkan prinsip 6 pilar.

Tabel 1. Check List Pengembangan Kawasan Hortikultura

No	Uraian	Jawaban		
		Ya/Ada/ Sudah	Tidak/ Belum	Dalam proses
1.	Keberadaan Kawasan agribisnis hortikultura telah sesuai dengan RUTR			
2.	Kajian tentang kawasan Agribisnis			
3.	Keterlibatan instansi terkait dalam penetapan kawasan agribisnis hortikultura			
4.	Koordinasi/sosialisasi dengan kabupaten yang masuk dalam kawasan			
5.	Identifikasi potensi lahan & kondisi agroklimat			
6.	Identifikasi potensi areal pengembangan dari masing-masing komoditas potensial (unggulan nasional & unggulan daerah) di kawasan			
7.	Identifikasi masa panen dari masing-masing komoditas potensial (unggulan nasional & unggulan daerah) di kawasan			
8.	Identifikasi sarana & prasarana pengairan di kawasan			
9.	Identifikasi sarana & prasarana jalan di Kawasan			
10.	Identifikasi sarana & prasarana pasca panen di Kawasan			
11.	Identifikasi rantai pasar dan tujuan pasar dari masing-masing komoditas potensial di kawasan			
12.	Identifikasi kondisi SDM Pertanian di kawasan (PPL, Mantri Tani, PHP, alumnus SLPHT, Kontak Tani) ?			
13.	Identifikasi kondisi kelembagaan Pertanian kawasan			
14.	Identifikasi kondisi sarana & prasarana transportasi serta aksesibilitas di kawasan			

Tabel 2. Check List Penerapan GAP / SOP (Good Agricultural Practices / Standard Operational Procedure):

No	Uraian	Jawaban		
		Ya/Ada/ Sudah	Tidak/ Belum	Dalam proses
1	Sosialisasi GAP kepada aparat dan stake holder : -Tk. Provinsi -Tk. Kabupaten			
2	Perbanyakan dan pendistribusian buku GAP			
3	Penyusunan SOP spesifik komoditas dan spesifik lokasi dengan melibatkan petugas berbagai institusi, petani dan stake holder lain			
4	Perbanyakan dan pendistribusian SOP			
5	Ketersediaan petugas lapang yang sudah terlatih sebagai pendamping dalam penerapan GAP/SOP			
6	Ketersediaan kebun percontohan GAP/SOP			
7	Penerapan langkah-langkah SOP sudah memenuhistandard dan sesuai dengan panduan SOP yang telah dibuat			
8	Dalam penerapan langkah-langkah SOP, ditemukan kendala-kendala antara lain : - Kerjasama Kelompok Tani - Penerapan teknis di lapang - Pemahaman petugas lapang pendamping			
9	Kebun penerapan GAP/SOP diarahkan pada kebun milik petani/Kelompok Tani alumni SLPHT			
10	Kemitraan Kelompok Tani penerap GAP/SOP dengan swasta			
11	Pelaksanaan registrasi kebun GAP/SOP oleh Dinas Pertanian Propinsi			
12	Identifikasi kebun untuk perluasan penerapan GAP/SOP			

No	Uraian	Jawaban		
		Ya/Ada/ Sudah	Tidak/ Belum	Dalam proses
13	Identifikasi paket-paket teknologi dalam penerapan GAP/SOP untuk dapat memenuhi keinginan pasar			
14	Koordinasi dengan BPTP/Perguruan Tinggi dalam pengawasan penerapan GAP/SOP di lapang			
15	Keberadaan kegiatan demplot/Prima Tani hortikultura di kawasan lokasi kebun GAP/SOP			
16	Petugas lapang yang aktif mendampingi penerapan GAP/SOP antara lain : - Penyuluh - PHP/POPT - Mantri Tani			
17	Ketersediaan petugas yang sudah terlatih dalam penilaian kebun GAP/SOP			
18	Keberadaan otoritas kompeten ketahanan pangan daerah (OKKPD) secara resmi			
19	Pelaksanaan akreditasi oleh OKKPD			

Tabel 3. Check List Penataan Rantai Pasokan (SCM)

No	Uraian	Jawaban		
		Ya/Ada/ Sudah	Tidak/ Belum	Dalam proses
1.	Identifikasi tujuan pasar komoditas-komoditas potensial (unggulan nasional & unggulan daerah)			
2.	Identifikasi alur rantai pasokan pasar komoditas-komoditas potensial			
3.	Identifikasi pelaku-pelaku usaha yang berperan dalam rantai pasokan			
4.	Kondisi rantai pasokan pasar komoditas yang ada telah efisien			
5.	Kondisi rantai pasokan pasar komoditas yang ada sudah transparan			
6.	Komunikasi antar pelaku dalam setiap tingkatan rantai pasokan telah berjalan dengan baik			
7.	Pernah dilakukan survey pasar untuk mengetahui keinginan konsumen terhadap kualitas produk yang dihasilkan			
8.	Komoditas hortikultura yang sudah dihasilkan sudah memenuhi keinginan konsumen, baik harga, mutu maupun kontinuitasnya			
9.	Pelaku usaha dalam setiap mata rantai pasokan telah menerima harga yang wajar / adil			
10.	Produk yang dihasilkan petani hortikultura telah memiliki posisi tawar yang tinggi terhadap pedagang/tengkulak/ pengumpul			
11.	Telah teridentifikasi Champion dalam setiap rantai pasokan komoditas			
12.	System pembayaran dalam rantai pasokan sudah berjalan dengan baik (tidak merugikan produsen)			

Membangun Hortikultura Berdasarkan Enam Pilar Pengembangan

No	Uraian	Jawaban		
		Ya/Ada/ Sudah	Tidak/ Belum	Dalam proses
13.	Alur informasi produk / pasar telah berjalan dengan baik dalam rantai pasokan			
14.	Sarana dan prasarana pasca panen kondisinya memadai			
15.	Proses distribusi produk dari produsen sampai ke konsumen telah berjalan baik			
16.	Produsen/petani memahami konsumen sasaran pasar komoditi yang diusahakan (ekspor, industri, supermarket, pasar induk, pasar tradisional)			
17.	Menerapkan GAP / SOP budidaya dalam usaha tani menciptakan nilai tambah			
18.	Sistem pembagian harga/margin ada pola kemitraan			
19.	Dalam hubungan efektif antar pelaku tersedia tenaga pendamping			
20.	Kebijakan untuk mendorong investasi			
21.	Peraturan-peraturan bersifat diinvestasi (pungutan, retribusi)			
22.	Tersedianya SDM petani			
23.	Ada petugas SDM penyuluh di lokasi			
24.	Ada SDM pendamping dari mitra			
25.	Prasarana kondisi jalan usahatani :			
	- Bagus			
	- Sedang			
	- Rusak			
26.	Prasarana jalan ke usahatani :			
	- Trailer			
	- Container			
	- Truck			
27.	Persarana pasar :			
	- Terminal Agribisnis			
	- Sub Terminal Agribisnis			

Membangun Hortikultura Berdasarkan Enam Pilar Pengembangan

No	Uraian	Jawaban		
		Ya/Ada/ Sudah	Tidak/ Belum	Dalam proses
	- Pasar Tradisional			
	- Pasar Penampungan sementara			
28.	Ada prasarana coldstorage			
29.	Ada prasarana jaringan telephone			
30.	Ada prasarana jaringan listrik			
31.	Tersedia sarana kios saprodi			
32.	Ada kelembagaan kelompok tani			
33.	Tersedia kelembagaan institusi pertanian			
34.	Tersedia kelembagaan institusi penyuluhan			
35.	Tersedia kelembagaan institusi penelitian			
36.	Tersedia kelembagaan pembiayaan			
37.	Tersedia koperasi petani			
38.	Tersedia sistem informasi jaringan komunikasi :			
	- Telephone			
	- Media Cetak			
	- Internet			
	- TV			
	- Radio			
39.	Tersedia sistem informasi pasar			
40.	Sosial Budaya kearifan lokal/adat yang mendukung kemitraan :			
41.	Tersedia Sosial Budaya, organisasi sosial masyarakat :			
42.	Tersedia sistem keamanan lingkungan			
43.	Tersedia sistem pelayanan satu atap			

Tabel 4. Chek List Program FATIH (Fasilitasi Terpadu Investasi Hortikultura)

No	Uraian	Jawaban		
		Ya/Ada/ Sudah	Tidak/ Belum	Dalam proses
1	Profil Kawasan			
2.	Rancang bangun pengembangan Kawasan			
3.	Road Map Pengembangan Kawasan			
4.	Publikasi Rancang Bangun dan Road Map Pengembangan Kawasan			
5.	Konvensi (Pertemuan Koordinasi) Rancang Bangun dan Road map pengembangan kawasan			
6.	Fasilitasi Pelayanan Publik			
	- jalan raya / propinsi			
	- jalan kabupaten			
	- jalan desa			
	- jalan usaha tani			
	- infrastruktur pengairan			
	- pelayanan saprodi			
	- pelayanan keuangan (bank / non bank)			
	- pelayanan transportasi			
	- pelayanan komunikasi			
	- pelayanan informasi			
	- pelayanan teknologi			
	- pelayanan pemasaran / perdagangan			
	- pelayanan perijinan satu atap			
	- pelayanan karantina			
	- pelayanan pertanahan			
	- dll			

Tabel 5. Check List Program Pengembangan Kelembagaan

No	Uraian	Jawaban		
		Ya/Ada/ Sudah	Tidak/ Belum	Dalam proses
1.	Keberadaan kelompok tani dalam mengembangkan komoditas unggulan di kawasan			
2.	Keberadaan gabungan kelompok tani (Gapoktan) dalam mengusahakan komoditas unggulan			
3.	Jejaring antar kelompok tani			
4.	Kemitraan antara kelompok tani dengan pedagang / pengusaha			
5.	Peranan kelembagaan petani dalam rantai pasokan ?			
6.	Asosiasi pedagang di kawasan			
7.	Pertemuan antar petani - kelompok tani/ Gapoktan dengan asosiasi petani, asosiasi pedagang			
8.	Kemitraan kelembagaan petani dengan P4S ?			

Tabel 6. Check List Peningkatan Konsumsi Hortikultura dan Akselerasi Ekspor

No	Uraian	Jawaban		
		Ya/Ada/ Sudah	Tidak/ Belum	Dalam Proses
Peningkatan Konsumsi Hortikultura				
A.	Ketersediaan Produk			
1.	Tersedia lahan untuk mengembangkan komoditas			
2.	Produsen memproduksi jenis produk yang dibutuhkan konsumen			
3.	Produsen memproduksi dengan volume sesuai yang dibutuhkan konsumen			
4.	Produsen menghasilkan mutu produk yang sesuai dengan keinginan konsumen			
5.	Produsen dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan waktu yang dibutuhkan oleh konsumen.			
B.	Distribusi			
1.	Tersedia infrastruktur yang dibutuhkan untuk distribusi produk			
2.	Tersedianya sarana pengangkutan yang memadai untuk produk segar.			
3.	Produsen mengetahui waktu pengiriman produk yang diminta pasar.			
4.	Produsen mengetahui volume permintaan pasar.			
5.	Produk dikemas dalam kemasan yang menjamin mutu dan tingkat kesegaran produk			
6.	Tersedianya peraturan yang mendukung kelancaran distribusi.			
C.	Pemasaran / promosi			
1.	Tersedia sarana pemasaran produk yang mudah dijangkau oleh konsumen.			
2.	Produk selalu tersedia di tempat pemasaran.			
3.	Melakukan promosi pemasaran produk hortikultura			
4.	Sosialisasi manfaat produk hortikultura bagi kesehatan			

No	Uraian	Jawaban		
		Ya/Ada/ Sudah	Tidak/ Belum	Dalam Proses
D.	Daya Beli			
1.	Tersedia produk dengan harga terjangkau			
2.	Pengemasan produk yang sesuai dengan kemampuan daya beli masyarakat			
3.	Tidak adanya pungutan yang dapat membuat harga produk mahal			
AKSELERASI EKSPOR				
A.	Ketersediaan Produk			
1.	Tersedia lahan untuk mengembangkan komoditas ekspor			
2.	Produsen memahami standar mutu yang dibutuhkan pasar ekspor			
3.	Produsen mengetahui tingkat kebutuhan dari negara tujuan ekspor			
B.	Eksportir			
1.	Terdapat eksportir yang berkomitmen			
2.	Eksportir memahami prosedur ekspor komoditas hortikultura di masing-masing negara tujuan			
3.	Eksportir mengetahui standar mutu masing-masing negara tujuan ekspor			
4.	Eksportir melakukan pembinaan kepada produsen			
5.	Eksportir mengetahui waktu kebutuhan dari jenis komoditas hortikultura di negara tujuan ekspor			
C.	Ketersediaan Sarana			
1.	Tersedia infrastruktur yang memperlancar distribusi produk ekspor			
2.	Tersedianya rumah pengepakan yang teregistrasi			
3.	Tersedianya sarana penyimpanan yang dibutuhkan			
4.	Tersedianya sarana pengangkutan yang memadai			

No	Uraian	Jawaban		
		Ya/Ada/ Sudah	Tidak/ Belum	Dalam Proses
D.	Akses Pasar			
1.	Tersedia informasi tentang peraturan mengenai prosedur ekspor dari negara-negara tujuan ekspor			
2.	Tersedianya persyaratan SPS yang dibutuhkan			
3.	Telah disusun protokol ekspor untuk komoditas hortikultura			
4.	.Adanya mitra eksportir di Negara tujuan ekspor			